

KSAL Sudah Ajukan Modernisasi Alutsista Korps Marinir ke Kemenhan

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan upaya modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik Korps Marinir ke Kementerian Pertahanan.

Dijelaskannya bahwa alutsista milik korps baret ungu itu secara perlahan akan terus dibenahi dan dimodernisasi.

“Ke depan, Korps Marinir harus memiliki peralatan dan persenjataan yang modern,” kata Yudo usai memimpin serah terima jabatan Komandan Korps Marinir dari Mayjen Suhartono kepada Mayjen Widodo Dwi Purwanto, dikutip dari rilis yang diterima wartawan, Senin (7/2).

Selain itu, Yudo menyampaikan, sebagai bagian dari

TNI dan TNI AL, Korps Marinir memiliki loyalitas tinggi dan tegak lurus sesuai komando yang diberikan satuan atas. Sejarah, kata dia, sudah membuktikan itu.

Yudo mengatakan, sejak 2019, Korps Marinir ini sudah berstatus sebagai komando utama operasi dan komandi utama pembinaan. Sebagai komando utama operasi, penggunaan kekuatan Marinir sesuai perintah Panglima TNI. Sedangkan, dalam pembinaan di bawah KSAL.

Ke depan, kata Yudo, pihaknya ingin menjadikan Korps Marinir sebagai satuan yang modern dan profesional dalam hal pembinaan.

“Sedangkan penggunaan kekuatannya oleh Panglima TNI baik untuk tugas-tugas operasi militer perang maupun operasi militer selain perang,” ujar Yudo. ● me



IMBAUAN LANSIA TIDAK KELUAR RUMAH

Warga berjalan melintasi lukisan yang dijual di Bandung, Jawa Barat, Senin (7/2). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta lansia 60 tahun ke atas yang belum divaksinasi dan memiliki komorbid untuk tidak keluar rumah dalam dua pekan hingga sebulan ke depan untuk mencegah penularan COVID-19 varian Omicron.

Susi Air Beri Waktu 3 Hari kepada Bupati Malinau Bayar Ganti Rugi Rp8,9 M

JAKARTA (IM) - PT ASI Pudjiastuti Aviation (Susi Air) meminta Bupati Malinau Wempi Wellem Mawa dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malinau Ernes Silvanus memenuhi tuntutan dalam somasi mereka dalam waktu 3 hari.

Kuasa hukum Susi Air, Donal Fariz, mengatakan, somasi dikirimkan kepada keduanya karena dinilai paling bertanggung jawab atas persoalan pengusiran Susi Air dari hanggar Bandara Robert Atty Bessing Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Hal ini disampaikan dalam somasi yang dikirimkan pada 7 Februari 2022.

“Mengganti kerugian operasional Susi Air sebesar Rp 8.955.000.000 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) yang berasal dari kerugian akibat pembatalan penerbangan, biaya maintenance dan pemindahan barang-barang,” kata kuasa hukum Susi Air, Donal Fariz dalam keterangan tertulis, Senin (7/2).

Selain itu, kuasa hukum juga meminta Bupati dan Sekda Malinau meminta maaf secara tertulis kepada Susi Air. Sebab, Donal mengatakan, tindakan pengusiran paksa itu merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang.

Lebih lanjut, Donal menduga tindakan Pemkab Malinau menerbitkan perangkat satuan polisi pamong praja (Satpol PP) untuk mengusir paksa merupakan tindakan melawan hukum karena tidak sesuai aturan. Ia mengatakan, ini bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi.

Kemudian, ia juga menduga, Satpol PP dan Anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau telah bertindak di luar kewenangan

untuk melakukan eksekusi atau pengosongan secara paksa pada area daerah keamanan terbatas bandar udara.

“Sehingga diduga telah melanggar Pasal 210 jo Pasal 344 huruf (a) dan (c) Undang-Undang No 1 Tahun 2009,” ujarnya.

Menurutnya, OPS Susi Air telah melok dan tidak menandatangani berita acara eksekusi. Namun, Pemkab Malinau tetap mengerahkan Satpol PP dan Dinas Perhubungan yang diduga tidak sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Diduga Pemkab Malinau melakukan tekanan dan paksaan dengan cara pengerahan pasukan secara berlebihan dan tetap memaksa melakukan eksekusi.

“Sehingga hal tersebut diduga sudah melanggar Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pesawat Susi Air dikeluarkan paksa dari Hanggar Bandara Robert Atty Bessing, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara sejak 2 Februari 2022 lalu. Menurut pihak Pemkab, pemindahan pesawat Susi Air dari hanggar disebabkan oleh masa perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak telah berakhir.

Namun, Susi Air membantah adanya kabar yang menyebut pihaknya tidak membayar sewa di Hanggar Bandara Malinau, Kalimantan Utara.

“Sekalipun sudah dipastikan Susi Air yang ke luar dari bandara (Malinau), kewajiban tetap kami bayarkan dan kami juga lunasi,” ujar Donal Fariz, dalam konferensi pers virtual.

“Jadi kalau ada yang bilang tidak bayar sewa adalah informasi tidak benar. Karena kami mendengar pernyataan itu disampaikan oleh pejabat di Kabupaten Malinau,” kata Donal. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANT



SERTIJAB KOMANDAN KORPS MARINIR

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono (tengah), pejabat baru Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) Widodo Dwi Purwanto (kanan) dan pejabat lama Mayjen TNI (Mar) Suhartono (kiri) melakukan salam komando sesuai Upacara Serah Terima Jabatan Komandan Korps Marinir (Dankormar) di Markas Komando Korps Marinir, Kwi-tang, Jakarta, Senin (7/2). Mayjen TNI (Mar) Widodo Dwi Purwanto resmi menjabat sebagai Dankormar menggantikan Mayjen TNI (Mar) Suhartono.

Ini Penjelasan Jenderal Dudung Soal “Tuhan Kita Bukan Orang Arab”

Dudung memastikan tidak mempermasalahkan pelaporan tersebut. Menurut dia, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan ketimbang terlalu sibuk dengan urusan seperti itu.

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman akhirnya buka suara ihwal laporan yang dialamatkan kepadanya oleh Koalisi Ulama, Habaib, dan Pengacara Anti Penodaan Agama (KUHAP APA). Mereka melaporkan Dudung terkait ucapannya “Tuhan Kita Bukan Orang Arab” di salah satu podcast.

Dudung mengaku tak merasa terganggu oleh pelaporan tersebut. Menurut dia, lantaran laporan itu hanya bentuk keterangan tertulis, maka dia telah memerintahkan Dan Puspomad untuk meminta keterangan Koalisi itu secara langsung.

“Saya sampaikan ke Danpuspomad, silakan. Dilaporkannya kan tertulis, saya bilang kemarin, silakan datang,” kata Dudung di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (7/2).

Lebih jauh disampaikan Dudung, jika para anggota Koalisi tersebut betul-betul datang, dirinya meminta kepada Danpuspomad untuk dicek siapa saja di baliknya. Bahkan, kepada Danpuspomad dirinya meminta untuk difoto satu persatu anggota Koalisi.

“Cek jauh koalisi itu, orang-orang itu siapa saja. Nanti kalau datang, Danpuspomad foto satu-satu mukanya, biar kita tahu siapa mereka,” ucapnya.

Dudung memastikan tidak mempermasalahkan pelaporan tersebut. Menurut dia, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan ketimbang terlalu sibuk dengan urusan seperti itu.

“Kalau kita pakai bahasa Indonesia, Tuhan itu mengerti, karena Allah tahu Bahasa Sunda, Bahasa Jawa, Bahasa

banyak pekerjaan yang harus dilakukan ketimbang terlalu sibuk dengan urusan seperti itu.

“Silakan saja laporkan, enggak masalah. Saya enggak terlalu ini lah sama hal-hal seperti itu. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan strategis bagi saya,” ujarnya.

Dudung pun menjelaskan soal pernyataannya yang menyebut “Tuhan Kita Bukan Orang Arab”. Menurut Dudung, Tuhan pastilah mengerti apapun perkataan yang disebutkan oleh manusia selaku hambanya.

“Saya sampaikan saya berdoa pakai bahasa Indonesia. ‘Ya Tuhan anak saya hari ini ujian semester. Mohon diberikan ketenangan, semoga bisa menyelesaikan persoalan dengan baik dan nilainya bagus’. Bahasa Arabnya apa? Kan kita enggak tahu,” kata Dudung di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (7/2).

“Kalau kita pakai bahasa Indonesia, Tuhan itu mengerti, karena Allah tahu Bahasa Sunda, Bahasa Jawa, Bahasa

Ambon, Bahasa Inggris saja Allah tahu,” ujar mantan Pangdam Jaya itu.

Jenderal bintang empat itu menyatakan, pernyataan serupa juga pernah disampaikan oleh salah satu budayawan Emha Ainun Najib atau Cak Nun, namun tidak menjadi persoalan. Namun, hal itu berbeda ketika dia yang mengutarakan.

“Dulu Ainun Najib ngomong begitu enggak jadi persoalan, karena Dudung yang ngomong dengan A. Yani, karena Dudung inikan disorang kelompok-kelompok itu,” ungkapnya.

Lebih jauh, dia menjelaskan

kan bahwa kelompok-kelompok yang menyerangnya merupakan kelompok kecil. Meskipun begitu, sambung dia, suara dari kelompok kecil itu begitu nyaring.

“Kelompok itu kecil sebetulnya, tetapi nyaring bunyinya. Kita hadapi di Jakarta persoalan. Namun, hal itu berbeda ketika dia yang mengutarakan.

“Dulu Ainun Najib ngomong begitu enggak jadi persoalan, karena Dudung yang ngomong dengan A. Yani, karena Dudung inikan disorang kelompok-kelompok itu,” ungkapnya.

Seleksi Calon Komisioner Komnas HAM Dibuka, Pendaftaran Mulai 8 Februari

JAKARTA (IM) - Panitia Seleksi Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membuka pendaftaran untuk mencari calon pengganti para komisioner yang bertugas saat ini. Sebagai informasi bahwa masa jabatan 7 komisioner Komnas HAM akan habis pada November 2022 mendatang.

Ketua Pansel Anggota Komnas HAM Makarim Wibisono mengatakan pendaftaran berkas mulai dibuka hari ini, Selasa (8/2).

“Sebagai unsur masyarakat bisa berpartisipasi dalam proses seleksi. Mekanisme pendaftaran, berkas bisa dikirimkan via online ke www.komnasham.go.id/pendaftaran dan dokumen fisik dikirimkan ke alamat Komnas HAM RI di Jakarta,” jelas Makarim dalam konferensi pers virtual, Senin (7/2).

Makarim menjelaskan akan ada 6 tahapan dalam proses seleksi tersebut yaitu seleksi administrasi, tes tertulis dan penulisan makalah, dialog publik, psikologi, kesehatan, serta wawancara. “Pelaksanaan seleksi berlangsung dari Februari sampai Agustus 2022,” ucapnya.

Makarim berharap pihaknya bisa mendapatkan calon kandidat komisioner yang potensial.

“Kami mengharapkan calon anggota punya visi dan misi mengembangkan Komnas HAM yang strategis, dan visioner. Punya kemampuan memaksimalkan kewenangan yang pro justitia dan mendorong terobosan untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu,” ujarnya.

Untuk diketahui, 7 Komisioner Komnas HAM adalah Ahmad Taufan Damanik sebagai ketua dan sebagai wakil ketua yaitu Amiruddin, Sandrayati Moniaga, Beka Ulung Hapsara, Mohammad Chairul Anam, Hairansyah, dan Munafrazal Manan.

Adapun Pansel Komisioner Komnas HAM diketuai oleh Makarim Wibisono dan ditemani Kamala Chandrakirana sebagai wakil ketua, lalu beranggotakan Azyumardi Azra, Harkristuti Harkrisnowo serta Marzuki Darusman.

Pansel menargetkan nama-nama calon kandidat yang lolos sampai tahap akhir bisa diajukan ke DPR untuk menjalani fit and proper test pada September tahun ini. ● han

Polisi Limpahkan Kasus Mafia Tanah di Depok ke Kejaksaan Pekan Depan

JAKARTA (IM) - Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri akan melimpahkan berkas perkara kasus mafia tanah Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Eko Herwiyanto dan Anggota DPRD Depok Nurdin ke Kejaksaan.

Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi, berkas perkara (BP) itu akan dilimpahkan minggu depan.

“Rencananya penyidik akan melimpahkan BP ke JPU (jaksa penuntut umum) minggu depan. Saat ini masih ada beberapa dokumen bukti yang harus dilengkapi penyidik sebelum pelaksanaan minggu depan,” kata Andi kepada wartawan, Senin (7/2).

Polisi menetapkan empat tersangka dalam kasus ini.

Selain Eko dan Nurdin, dua tersangka lainnya yakni pihak swasta Hanafi, dan mantan Direktur PT Abdulurur Kawuloat Burhanudin Abu Bakar. Andi memastikan tidak ada tambahan tersangka dalam kasus ini.

“Tidak ada penambahan tersangka,” jelas Andi. Andi mengatakan para tersangka tidak akan ditahan.

“Tidak ada penahanan,” ujar Andi tanpa menjelaskan apa alasannya kenapa para tersangka tidak ditahan.

Diberitakan sebelumnya, kasus ini berdasarkan laporan polisi dari seorang korban berinisial ES. Pelapor merupakan seorang purnawirawan jenderal bintang dua TNI Angkatan Darat yang pernah menjabat sebagai mantan direktur Badan Intelijen Strategis

(BAIS) TNI.

Laporan ES itu dibuat oleh kuasa hukumnya pada 8 Juli 2020 dan telah diterima polisi dengan nomor: LP/B/0372/VII/2020/Bareskrim. Kejadian berawal dari adanya dugaan pemalsuan surat pernyataan pelepasan hak untuk kepentingan swasta yang dibuat oleh Hanafi dan Nurdin.

Dalam melakukan pemalsuan, Nurdin dan Hanafi mendapat bantuan Eko yang saat itu masih menjabat sebagai Camat Sawangan, Depok. Polisi menyebut surat pernyataan palsu itu kemudian digunakan Burhanudin sebagai dokumen yang dilampirkan dalam permohonan penyerahan sebidang tanah milik ES kepada Pemkot Depok untuk menjadi makam atau TPU. ● ber



FOTO: ANT

KOMNAS HAM PERIKSA BUPATI LANGKAT NONAKTIF

Komisioner Pemantauan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam (kiri) bersama Komisioner Penyelidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Beka Ulung Hapsara (kanan) berjalan menuju ruangan pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (7/2). Kedatangan Komnas HAM tersebut untuk memeriksa Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin terkait penemuan kerangkeng berisi manusia di rumahnya.

Pemindahan IKN ke Kalimantan untuk Menjawab Tantangan Pemanasan Global

JAKARTA (IM) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bukan hanya menjawab tantangan domestik Indonesia saja, seperti soal ketimpangan Jawa dan Luar Jawa.

Menurutnya, Indonesia sedang mencoba menjawab tantangan global yang nyata, yakni pemanasan global.

“Berdasarkan data penelitian, tanpa pengurangan emisi karbon, suhu bumi akan naik 1,5 sampai 3 derajat celsius pada 2050. Ini tantangan nyata yang sedang dijawab Indonesia dengan pemindahan IKN,” ujar Wandy dalam siaran pers KSP, Senin (7/2).

Wandy menegaskan, Indonesia telah mengungkapkan komitmennya untuk turut berpartisipasi menurunkan 29 persen emisi karbon di tahun 2030. Bahkan dengan bantuan internasional, Indonesia bisa

meningkatkan menjadi 41 persen.

“Kita butuh akselerasi dan upaya out of the box untuk menunjukkan komitmen itu. Apalagi 2030 hanya berjarak 8 tahun dari sekarang,” ungkap Wandy.

Wandy optimistis, dengan mewujudkan IKN sebagai kota di dalam hutan, yang lebih dari 60 persen wilayahnya akan menjadi ruang hijau, maka Indonesia akan membuktikan bisa berubah. Selain itu dapat menjadi salah satu negara yang berkontribusi dalam mengatasi pemanasan global.

“Pemindahan IKN adalah showcase yang nyata terhadap komitmen itu,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pembangunan IKN akan menggunakan konsep smart dan green, dari mulai kawasan pemerintahan hingga permukiman. Konsep smart yang dimaksud, setiap infrastruktur yang dibangun akan menggunakan teknologi modern dalam implementasinya. ● me

PANGGILAN KEDUA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WACHYUNI MANDIRA ("Perseroan")

Direksi dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPS LB") yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Februari 2022
Waktu : Pkl. 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Desa Gajah Mati Sei Sibur, Kelurahan Gajah Mati Pematang Panggang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

Dengan Agenda RUPS LB sebagai berikut:
- Pembubaran/ likuidasi Perseroan

Catatan:
1. Pemegang saham atau kuasa yang hadir dalam RUPS LB harus membawa kartu identitas yang masih berlaku.
2. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam RUPS LB dapat menunjuk Penerima Kuasa dengan membuat surat kuasa yang sah secara hukum.
3. Perseroan tidak menginkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham dan iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan.
4. Pemegang Saham atau kuasanya, harap hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS LB dilaksanakan.
Palembang, 8 Februari 2022
Direksi Perseroan